

ABSTRAK

Siti Fatima'tu Zahra: Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Upaya Penguatan Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sumedang

Fenomena kenaikan harga barang maupun jasa yang terjadi secara terus menerus atau yang sering disebut sebagai fenomena inflasi dapat memberikan pengaruh bagi kemampuan daya beli masyarakat. Dalam mengatasi hal ini diperlukan peran pemerintah didalamnya untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada melalui instrumen kebijakan yang dikeluarkan. Sebagai tanggapan dari hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengendalikan inflasi daerah yang kemudian disebut sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya penguatan daya beli masyarakat di Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Kasmad, 2013) yang memuat tiga dimensi, diantaranya (1) mudah/tidaknya masalah dikendalikan, (2) kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi, dan (3) variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif, dan materi audio dan visual kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya penguatan daya beli masyarakat di Kabupaten Sumedang yang dikaitkan dengan dimensi teori setidaknya memuat tiga hal. Pengukuran permasalahan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pemerintah mendapat kendala karena perhitungan inflasinya tidak diukur secara langsung oleh Bank Indonesia akan tetapi telah ditanggulangi dengan hadirnya aplikasi SINDANG. Kedua, pada kemampuan kebijakan menstruktur implementasi telah memiliki acuan melalui peta jalan yang telah dibuat namun pada pelaksanaannya masih perlu adanya perbaikan khususnya dari kinerja pelaksana terkait. Adapun variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, Kabupaten Sumedang telah mampu menjalin kerjasama baik secara internal maupun eksternal namun tetap diperlukan adanya upaya yang masif dari pelaksana terkait agar membantu berjalannya pelaksanaan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Kebijakan Inflasi, Pengendalian Inflasi, Daya Beli